

STRATEGI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA RAWAN PANGAN

Ening Ariningsih dan Handewi P.S. Rachman

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani 70 Bogor 16161*

ABSTRACT

This paper aims at analyzing food insecurity problem at household level and its alleviation strategy alternatives. The analysis results are expected to become inputs for policy makers at central and local government levels in order to strengthen food security and overcome food insecurity at household level. The analysis used the National Socio-Economic Survey data of BPS-Statistics Indonesia. The results show that (1) proportion of household included in food insecurity in off Java provinces, especially those in East Region of Indonesia and in rural areas were higher than those of in West Region of Indonesia and in urban areas; this implies that food insecurity handling problem should be prioritized in those regions, so that the gaps between West and East regions of Indonesia and between rural and urban areas could be reduced; and (2) activities on food security is not only shouldered by the government, but also society; each administration level has its responsibility to implement food security policies and food insecurity programs according to their respective job description. Meanwhile, in order to overcome food insecurity, people are expected to participate in various programs and activities, such as participation in the empowerment of integrated service post (*Posyandu*), social care programs, social-religion activities, etc.

Key words : *food security, food insecurity, household*

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kerawanan pangan rumah tangga dan alternatif strategi penanggulangannya. Hasil analisis diharapkan menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan tingkat pusat maupun daerah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan menanggulangi kerawanan pangan rumah tangga. Data yang digunakan adalah data Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) tahun 1996-2005 dari Badan Pusat Statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) proporsi rumah tangga rawan pangan di provinsi-provinsi luar Jawa khususnya wilayah Kawasan Timur Indonesia dan daerah perdesaan relatif tinggi dibanding wilayah Kawasan Barat Indonesia dan daerah perkotaan, implikasinya adalah penanganan masalah rawan pangan perlu diprioritaskan pada wilayah-wilayah tersebut agar kesenjangan antara Kawasan Timur dan Barat Indonesia serta kesenjangan desa - kota tidak semakin melebar; (2) perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, masing-masing tingkatan pemerintahan melaksanakan kebijakan dan program ketahanan pangan dan penanganan masalah kerawanan pangan sesuai dengan mandat dan tupoksinya. Sementara itu, dalam upaya penanggulangan rawan pangan masyarakat diharapkan dapat berperan sesuai dengan kapasitas dan potensinya dan dapat diapresiasi pada kegiatan

pemberdayaan posyandu, dasawisma, kepedulian sosial, kegiatan PKK dan aktifitas sosial keagamaan.

Kata kunci : ketahanan pangan, kerawanan pangan, rumah tangga

PENDAHULUAN

Kerawanan pangan merupakan suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang pada waktu-waktu tertentu (kronis) dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien) (Dewan Ketahanan Pangan, 2006). Sementara menurut Saliem *et al.* (2002) kerawanan pangan di tingkat wilayah maupun tingkat rumah tangga/individu merupakan kondisi tidak tercapainya ketahanan pangan di tingkat wilayah maupun rumah tangga/individu. Oleh karena itu, membahas kerawanan pangan tidak terlepas dari konsep ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan terjemahan dari *food security*, secara luas diartikan sebagai terjaminnya akses pangan bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya agar dapat hidup sehat dan beraktivitas. Membahas ketahanan pangan (dan juga kerawanan pangan) pada dasarnya juga membahas hal-hal yang menyebabkan orang tidak tercukupi kebutuhan pangannya. Tidak tercukupinya kebutuhan pangan dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, distribusi, dan akses terhadap pangan.

Persediaan pangan yang cukup secara nasional maupun regional tidak menjamin adanya ketahanan pangan rumah tangga/individu. Studi Saliem *et al.* (2001) menunjukkan bahwa walaupun ketahanan pangan di tingkat regional (provinsi) tergolong tahan pangan terjamin namun di provinsi yang bersangkutan masih ditemukan rumah tangga yang tergolong rawan pangan dengan proporsi relatif tinggi. Dampak dari kerawanan pangan dan kekurangan gizi dapat terjadi pada semua umur, baik orang tua, dewasa, anak-anak, bayi maupun ibu hamil. Hasil analisis BPS (Ariani *et al.*, 2007) menunjukkan lebih dari setengah jumlah kabupaten/kota di Indonesia memiliki prevalensi balita kurang gizi lebih dari 25 persen, sementara proporsi penduduk yang mengkonsumsi energi kurang dari 2.100 kkal/kap/hari sebesar 64 persen.

Kasus gizi buruk yang muncul di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selama ini dikenal sebagai daerah lumbung beras menunjukkan bahwa ketahanan pangan regional tidak menjamin ketahanan pangan rumah tangga. Di Nusa Tenggara Barat, anak balita yang menderita gizi buruk atau bahkan busung lapar mencapai 10 persen dari total anak balita, atau sekitar 49.000 anak balita.

Secara nasional, kasus busung lapar yang menyerang anak-anak di bawah usia lima tahun mencapai angka 8 persen. Sesuai dengan proyeksi penduduk

Indonesia yang disusun BPS, tahun 2005 jumlah anak usia 0-4 tahun di Indonesia mencapai 20,87 juta. Itu berarti saat ini ada sekitar 1,67 juta anak balita yang menderita busung lapar. Kondisi demikian sangat memprihatinkan karena dalam pertumbuhannya otak anak-anak tersebut tidak akan berkembang, cacat, dan tak akan pernah bisa dipulihkan, sehingga *lost generation* menghantui masa depan bangsa kita.

Terjadinya kasus rawan pangan dan gizi buruk di beberapa daerah menunjukkan bahwa masalah ketahanan pangan bukan masalah yang sederhana dan dapat diatasi sesaat saja, melainkan merupakan masalah yang cukup kompleks karena tidak hanya memperhatikan situasi ketersediaan pangan atau produksi di sisi makro saja melainkan juga harus memperhatikan program-program yang terkait dengan fasilitasi peningkatan akses terhadap pangan dan asupan gizi, baik di tingkat rumah tangga maupun bagi anggota rumah tangga itu sendiri. Dalam era desentralisasi, diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-program penanggulangan rawan pangan dan gizi buruk tersebut.

Kejadian rawan pangan dan gizi buruk mempunyai makna politis yang negatif bagi penguasa, bahkan di beberapa negara berkembang krisis pangan dapat menjatuhkan pemerintah yang sedang berkuasa (Hardinsyah *et al.*, 1999). Sejarah membuktikan bahwa ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional. Dalam arti jika dalam suatu negara terjadi kerawanan pangan maka kestabilan ekonomi, politik dan sosial akan terguncang (Suryana, 2001; Simatupang *et al.*, 2001). Berdasar latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kerawanan pangan rumah tangga dan alternatif strategi penanggulangannya. Hasil analisis diharapkan menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan tingkat pusat maupun daerah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan menanggulangi kerawanan pangan rumah tangga.

PERKEMBANGAN DAN KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA RAWAN PANGAN

Perkembangan Rumah Tangga Rawan Pangan

Perkembangan proporsi rumah tangga rawan pangan di Indonesia dalam rentang waktu 1996-2005 disajikan pada Tabel 1. Tabel tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang terjadi mulai pertengahan tahun 1997 telah berdampak sangat buruk bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut terlihat dari besarnya peningkatan jumlah rumah tangga rawan pangan di Indonesia, dari hanya sekitar 5 persen pada tahun 1996 menjadi sekitar 16 persen pada tahun 1999. Dalam upaya pemulihan ekonomi pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, pangan dan lainnya. Upaya

tersebut berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, yang ditunjukkan oleh peningkatan laju Produk Domestik Bruto (PDB) dari -6,17 persen pertahun pada periode 1998-1999 menjadi 3,92 persen pertahun pada periode 2000-2003 (Departemen Pertanian, 2004). Walaupun demikian, masih tingginya proporsi rumah tangga rawan pangan pada tahun 2005 menunjukkan bahwa dampak krisis tersebut belum sepenuhnya pulih.

Tabel 1. Proporsi Rumah Tangga Rawan Pangan di Indonesia, 1996-2005

| Uraian | Tahun | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 1996 | 1999 | 2002 | 2005 |
| <u>Indonesia</u> | 5,16 | 16,08 | 9,95 | 10,49 |
| Daerah Kota | 4,58 | 14,02 | 7,31 | 7,32 |
| Dareah Desa | 5,54 | 17,53 | 12,13 | 12,70 |
| Pulau Jawa | 5,98 | 16,05 | 9,00 | 9,16 |
| Pulau Luar Jawa | 4,49 | 16,10 | 10,94 | 11,73 |

Sumber: BPS, Susenas 1996, 1999, 2002, dan 2005 (diolah)

Keterangan: rumah tangga rawan pangan didefinisikan sebagai rumah tangga dengan konsumsi energi (ekuivalen orang dewasa) \leq 80 persen dari angka kecukupan energi dan dengan pangsa pengeluaran pangan $>$ 60 persen dari total pengeluaran rumah tangga (Jonsson dan Toole (1991) dalam Maxwell *et al.* (2000)).

Tabel 1 dengan jelas menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga rawan pangan di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Selama periode 1996-2005 kesenjangan proporsi rumah tangga rawan pangan di daerah perkotaan dan perdesaan semakin melebar. Hal ini mengindisasikan adanya kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Daerah perdesaan mengalami keterbatasan pengembangan infrastruktur (fisik dan kelembagaan), disamping itu kebijakan pembangunan bias pada daerah perkotaan, khususnya untuk sektor industri, perdagangan, dan jasa (Sayogyo, 2002). Akibatnya, kota mengalami pertumbuhan yang lebih cepat sedangkan daerah perdesaan relatif tertinggal.

Ketertinggalan tingkat kemajuan wilayah perdesaan juga disebabkan oleh masih rendahnya produktivitas dan kualitas petani dan pertanian, terbatasnya akses petani terhadap sumber daya permodalan, serta rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perdesaan. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat di perdesaan, yang mencakup sekitar 60 persen penduduk Indonesia, khususnya petani, masih sangat rendah. Hal tersebut tercermin dari jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin di perdesaan yang lebih besar dibandingkan perkotaan. Dari 36 juta penduduk miskin tahun 2004, sekitar 68 persen berada di perdesaan dan umumnya berada di sektor pertanian atau berbasis pertanian (DKP, 2006).

UNDP China (2001) menyebutkan bahwa penyebab terjadinya rawan pangan pada rumah tangga pertanian sangat kompleks, antara lain situasi sosial politik pertanian dan petaninya, rendahnya luas lahan pertanian produktif per kapita, rendahnya produktivitas dan kesuburan lahan, anomali iklim, rendahnya teknik pertanian modern yang berdampak pada rendahnya produksi pangan, serta rendahnya daya beli rumah tangga sebagai akibat terbatasnya pendapatan dari *off farm*. Walaupun demikian, permasalahan utama terjadinya kerawanan pangan yang sering muncul adalah karena terbatasnya pendapatan masyarakat.

Walaupun tidak setajam antara daerah perkotaan dan perdesaan, proporsi rumah tangga rawan pangan di Jawa dan Luar Jawa juga menunjukkan kesenjangan. Selama periode 1996-2005 proporsi rumah tangga rawan pangan di Luar Jawa cenderung semakin tinggi daripada di Jawa. Padahal pada tahun 1996 proporsi rumah tangga rawan pangan di Jawa masih lebih tinggi daripada di luar Jawa. Fenomena tersebut sejalan dengan data BPS yang menunjukkan bahwa selama periode 1993-2004 nilai tukar petani (NTP), yang menjadi ukuran tingkat kesejahteraan rumah tangga petani, di Jawa cenderung meningkat, sementara di luar Jawa menunjukkan kecenderungan yang sebaliknya. Kondisi ini terjadi sebagai akibat dari pembangunan yang terlalu bias ke Jawa berdampak pada ketertinggalan wilayah luar Jawa. Tabel 2 menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan proporsi rumah tangga rawan pangan tertinggi (Papua, Maluku, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara) merupakan provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang mempunyai sarana dan prasarana (infrastruktur) relatif tertinggal dibandingkan wilayah Kawasan Barat Indonesia, khususnya Jawa-Bali. Terlihat bahwa provinsi-provinsi yang mempunyai proporsi rumah tangga rawan pangan terendah adalah Bali, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Banten, dan Jawa Barat.

Tabel 2. Proporsi Rumah Tangga (RT) Rawan Pangan Tertinggi dan Terendah Menurut Provinsi, 2005

| Proporsi RT Rawan Pangan Tertinggi | | | Proporsi RT Rawan Pangan Terendah | | |
|------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
| No. | Provinsi | Proporsi (%) | No. | Provinsi | Proporsi (%) |
| 1 | Papua | 21,30 | 1 | Bali | 1,83 |
| 2 | Maluku | 18,14 | 2 | DKI Jakarta | 2,58 |
| 3 | Kalimantan Tengah | 18,14 | 3 | Kepulauan Riau | 4,28 |
| 4 | Nusa Tenggara Timur | 17,88 | 4 | Banten | 6,64 |
| 5 | Maluku Utara | 17,58 | 5 | Jawa Barat | 7,21 |

Sumber: BPS, Susenas 2005 (diolah)

Karakteristik Rumah Tangga Rawan Pangan

Secara umum karakteristik rumah tangga rawan pangan adalah: (1) umur kepala keluarga (KK) maupun isteri pada rumah tangga rawan pangan maupun

agregat merupakan umur produktif, di mana umur isteri lebih rendah daripada umur KK, (2) pendidikan kepala keluarga dan isteri pada rumah tangga rawan pangan lebih rendah daripada agregat, dan pendidikan isteri lebih rendah daripada KK, dan (3) jumlah anggota rumah tangga (JART) rumah tangga rawan pangan lebih tinggi daripada agregat (Tabel 3). Kecenderungan tersebut terlihat baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan dan di Jawa maupun luar Jawa.

Tingkat pendidikan yang relatif rendah pada rumah tangga rawan pangan terkait erat dengan kemiskinan yang mereka hadapi. Dalam kondisi kemiskinan, yang berarti terbatasnya pendapatan, mereka masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan primer seperti pangan, sehingga pendidikan bukan merupakan prioritas mereka. Walaupun berbagai program pendidikan telah diluncurkan pemerintah, misalnya program wajib belajar 9 tahun, Biaya Operasional Sekolah (BOS), pendidikan di Indonesia masih merupakan komoditas yang mahal. Padahal, seandainya masyarakat miskin mempunyai kemudahan dalam mengakses pendidikan, diharapkan tingkat pendidikan yang lebih baik dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka.

Tabel 3. Karakteristik Rumah Tangga Rawan Pangan dan Agregat di Indonesia, 1996-2005

| Karakteristik | Rawan Pangan | | | | Agregat | | | |
|------------------------|--------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | 1996 | 1999 | 2002 | 2005 | 1996 | 1999 | 2002 | 2005 |
| Umur KK (th) | 49,52 | 45,66 | 45,22 | 45,77 | 44,70 | 45,26 | 44,97 | 45,48 |
| Umur Isteri (th) | 43,78 | 39,70 | 39,61 | 40,18 | 38,15 | 38,98 | 38,89 | 39,48 |
| Pendidikan KK (th) | 3,44 | 4,58 | 4,48 | 4,74 | 5,37 | 5,83 | 6,28 | 6,33 |
| Pendidikan Isteri (th) | 2,20 | 3,27 | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,19 | 4,75 | 4,86 |
| JART (jiwa) | 4,58 | 4,85 | 4,85 | 4,92 | 3,44 | 4,15 | 4,01 | 4,01 |

Sumber: BPS, Susenas 1996, 1999, 2002, dan 2005 (diolah)

Relatif tingginya jumlah anggota rumah tangga pada rumah tangga rawan pangan juga berdampak pada buruknya kualitas konsumsi pangan dan gizi pada rumah tangga tersebut. Penelitian atas keluarga miskin di beberapa wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin menunjukkan bahwa anak-anak dalam keluarga yang jumlah anggotanya besar menghadapi resiko besar menderita kekurangan gizi. Hal ini disebabkan karena jumlah makanan yang dimakan keluarga besar dan miskin cenderung lebih rendah dibandingkan dengan jumlah makanan yang dimakan keluarga lebih kecil dengan tingkat pendapatan yang sama (Eckholm dan Newland, 1984 dalam Khomsan *et al.*, 1997). Studi Latief *et al.* (2000) juga menunjukkan bahwa distribusi pangan yang dikonsumsi semakin memburuk pada rumah tangga yang mempunyai jumlah anggota cukup besar. Kondisi tersebut

terjadi karena dalam kondisi kemiskinan mereka tidak mampu untuk menyediakan tambahan makanan yang memadai seiring dengan bertambahnya anggota keluarga. Terkait hal itu, AusAID (2004) menyebutkan bahwa kerawanan pangan kronis terlihat sebagai kerawanan pangan yang terbelenggu kemiskinan (*chronic food insecurity as a food insecurity poverty gap*). Dalam hal ini, program Keluarga Berencana Nasional seyogyanya lebih memberikan kemudahan akses kepada masyarakat miskin sehingga diharapkan dengan relatif kecilnya anggota keluarga maka tingkat ketahanan pangan mereka meningkat.

POLA PENGELUARAN PANGAN

Pangsa Pengeluaran Pangan

Dalam konteks analisis ketahanan pangan, pengetahuan tentang proporsi atau pangsa pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran pangan rumah tangga merupakan indikator ketahanan pangan rumah tangga yang sangat penting. Hukum Working (1943) seperti dikutip oleh Pakpahan *et al.* (1993) menyatakan bahwa pangsa pengeluaran pangan mempunyai hubungan yang negatif dengan pengeluaran rumah tangga, sedangkan ketahanan pangan mempunyai hubungan yang negatif dengan pangsa pengeluaran pangan. Hal ini berarti semakin besar pangsa pengeluaran pangan suatu rumah tangga, semakin rendah ketahanan pangannya.

Sesuai dengan definisi rumah tangga rawan pangan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, Tabel 4 menunjukkan bahwa pangsa pengeluaran pangan rumah tangga rawan pangan melebihi 60 persen. Namun demikian, nampak bahwa secara agregat nasional pun pangsa pengeluaran rumah tangga relatif besar, yaitu sekitar 60 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia masih rendah. Bandingkan dengan pangsa pengeluaran pangan di negara maju yang umumnya di bawah 50 persen (BPS, 2002 *dalam* Martianto dan Ariani, 2004), yang berarti alokasi pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan juga rekreasi memperoleh porsi yang lebih besar dibanding untuk pemenuhan kebutuhan pangan.

Krisis ekonomi yang terjadi mulai pertengahan tahun 1997 berdampak pada peningkatan alokasi anggaran untuk pangan, dan hal tersebut tidak hanya terjadi pada rumah tangga rawan pangan, melainkan pada masyarakat Indonesia umumnya. Peningkatan pangsa pengeluaran pangan menunjukkan terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan sekaligus tingkat ketahanan pangan masyarakat. Namun, sejalan dengan berbagai upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi melalui berbagai kebijakan khususnya di bidang ekonomi pangan, tingkat kesejahteraan masyarakat kembali meningkat tercerminkan oleh menurunnya pangsa pengeluaran pangan rumah tangga pada tahun 2005.

Tabel 4. Pangsa Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Rawan Pangan dan Agregat, 1996-2005

| Uraian | Rawan Pangan | | | | Agregat | | | |
|-------------|--------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | 1996 | 1999 | 2002 | 2005 | 1996 | 1999 | 2002 | 2005 |
| Nasional | 70,64 | 72,79 | 69,40 | 69,95 | 62,79 | 63,31 | 60,28 | 59,86 |
| Daerah | | | | | | | | |
| - Kota | 68,75 | 70,83 | 67,85 | 67,81 | 56,29 | 57,62 | 53,77 | 52,43 |
| - Desa | 71,67 | 73,90 | 70,17 | 70,81 | 67,11 | 67,33 | 65,62 | 65,04 |
| Pulau | | | | | | | | |
| - Jawa | 69,53 | 71,62 | 67,99 | 68,01 | 60,69 | 59,26 | 56,26 | 56,15 |
| - Luar Jawa | 71,85 | 73,85 | 70,60 | 71,38 | 64,51 | 67,08 | 64,41 | 63,34 |

Sumber: BPS, Susenas 1996, 1999, 2002, dan 2005 (diolah)

Pangsa pengeluaran pangan rumah tangga di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan, ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di perkotaan lebih baik daripada di perdesaan. Dengan perkataan lain, pembangunan perekonomian yang dilaksanakan oleh pemerintah dan juga sektor swasta masih bias pada perkotaan dan hasilnya lebih banyak dinikmati penduduk perkotaan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan kesejahteraan antara penduduk kota dan desa (Ariani, 2004).

Pangsa pengeluaran pangan rumah tangga rawan pangan maupun agregat di luar Jawa lebih tinggi dibandingkan di Jawa, yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan tingkat ketahanan pangan masyarakat di luar Jawa yang lebih rendah. Seperti sudah dibahas sebelumnya, kondisi ini merupakan akibat dari pembangunan yang terlalu bias ke Jawa, yang berdampak pada ketertinggalan wilayah luar Jawa.

Proporsi Pengeluaran Pangan menurut Jenis Pangan

Pengetahuan tentang besarnya proporsi masing-masing jenis pangan terhadap struktur pengeluaran pangan dapat mengidentifikasi peranan pangan tersebut dalam alokasi pendapatan rumah tangga. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan pertimbangan pengambil keputusan di bidang pangan dan gizi, terutama dikaitkan dengan kebijakan harga pangan maupun program penyediaan dan distribusi pangan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pangsa pengeluaran jenis pangan tertentu merupakan proporsi dari jumlah komoditas/jenis pangan yang dikonsumsi dikalikan dengan harga pangan tersebut terhadap pendapatan rumah tangga yang dialokasikan untuk pangan secara keseluruhan (Rachman, 2001).

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa proporsi pengeluaran beras terhadap total pengeluaran pangan sangat dominan, terlebih bagi rumah tangga rawan pangan.

Dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia yang relatif rendah, masyarakat akan cenderung memomorsatukan membeli beras untuk mengenyangkan perut sementara pangan lainnya kurang. Sementara itu, proporsi pengeluaran jagung, ubikayu, ubijalar, dan sagu sangat kecil karena dikonsumsi sebagai pangan pokok hanya di sebagian kecil wilayah di Indonesia, seperti jagung di Madura, NTT; ubikayu di daerah Gunung Kidul (Yogyakarta), Jatim bagian selatan; dan sagu di Maluku dan Papua.

Tabel 5. Proporsi Pengeluaran Komoditas Pangan Terhadap Total Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Rawan Pangan dan Agregat di Indonesia, 1996-2005

| Uraian | Rawan Pangan | | | | Agregat | | | |
|---------------------------------|--------------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | 1996 | 1999 | 2002 | 2005 | 1996 | 1999 | 2002 | 2005 |
| <i>Pangan Sbr Karbohidrati:</i> | | | | | | | | |
| Beras | 25,26 | 26,29 | 20,16 | 16,57 | 21,48 | 24,06 | 18,72 | 14,95 |
| Jagung | 0,50 | 0,79 | 0,69 | 0,59 | 0,32 | 0,41 | 0,41 | 0,35 |
| Ubikayu | 0,76 | 0,69 | 0,54 | 0,57 | 0,51 | 0,58 | 0,47 | 0,47 |
| Ubijalar | 0,31 | 0,16 | 0,13 | 0,61 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,31 |
| Sagu | 0,10 | 0,12 | 0,03 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,07 |
| Gula | 3,61 | 3,02 | 2,67 | 16,57 | 3,12 | 2,92 | 2,59 | 14,95 |
| <i>Pangan Sumber Protein:</i> | | | | | | | | |
| Kedelai | 3,13 | 2,94 | 2,45 | 2,34 | 2,40 | 2,86 | 2,53 | 2,51 |
| Daging unggas | 1,77 | 0,86 | 1,33 | 1,42 | 3,18 | 1,89 | 2,81 | 2,8 |
| Daging ruminansia | 1,20 | 0,62 | 0,87 | 0,81 | 1,97 | 1,28 | 1,61 | 1,44 |
| Telur | 2,89 | 2,37 | 2,50 | 2,53 | 3,15 | 2,94 | 3,09 | 2,86 |
| Susu | 0,78 | 0,75 | 0,93 | 1,37 | 2,49 | 1,73 | 2,34 | 2,81 |
| Ikan segar | 7,26 | 6,19 | 6,61 | 7,07 | 7,67 | 7,17 | 7,2 | 7,38 |
| Ikan awetan | 1,99 | 2,00 | 1,84 | 1,97 | 1,91 | 2,05 | 1,78 | 1,95 |

Sumber: BPS, Susenas 1996, 1999, 2002, dan 2005 (diolah)

Terjadinya krisis ekonomi menyebabkan proporsi pengeluaran beras meningkat. Hal ini disebabkan karena mahalnya harga beras. Walaupun sebagian kecil masyarakat mengalihkan pangan pokoknya ke nonberas, sebagian besar masyarakat memilih untuk tetap mengonsumsi beras walaupun harus mengorbankan pangan lainnya ataupun pengeluaran nonpangan. Sebagai pengalihan pangan pokok dari beras ke non beras, nampaknya komoditas jagung menjadi alternatif pilihan baik bagi rumah tangga rawan pangan maupun agregat, terlihat dari proporsi pengeluaran jagung yang meningkat dalam kurun waktu tersebut.

Proporsi pengeluaran kedelai dan produk-produk olahannya (tahu, tempe) yang menjadi lauk pauk sumber protein nabati cenderung cukup signifikan,

walaupun semakin menurun pada rumah tangga rawan pangan. Sementara itu secara agregat nasional proporsi pengeluaran kedelai meningkat pada waktu krisis ekonomi kemudian pada tahun 2002 kembali menurun, walaupun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 1996. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara agregat produk kedelai menjadi alternatif lauk pauk sebagai substitusi pangan hewani yang harganya lebih mahal, sementara rumah tangga rawan pangan terpaksa mengurangi pengeluaran untuk lauk pauk, sekalipun berupa tempe atau tahu yang harganya relatif murah.

Proporsi pengeluaran untuk komoditas pangan hewani menurun dalam kurun waktu 1996-1999 dan meningkat lagi dalam kurun waktu 1999-2002 walaupun masih lebih rendah dibandingkan tahun 1996. Kecenderungan seperti itu terjadi pada rumah tangga rawan pangan maupun agregat, dan pada semua jenis pangan hewani. Di antara produk-produk peternakan, proporsi pengeluaran telur adalah yang paling tinggi yang dapat diartikan pula akses rumah tangga terhadap telur relatif tinggi. Dalam hal demikian untuk jangka pendek peningkatan konsumsi protein hewani melalui peningkatan konsumsi telur merupakan salah satu pilihan kebijakan yang patut dipertimbangkan.

KONSUMSI PANGAN DAN GIZI

Konsumsi Pangan

Tabel 6 memperlihatkan bahwa tingkat konsumsi pangan sumber karbohidrat (energi) maupun pangan sumber protein pada rumah tangga rawan pangan umumnya jauh lebih rendah dibandingkan konsumsi rumah tangga secara agregat. Terbatasnya akses rumah tangga terhadap pangan menyebabkan tidak hanya pangan sumber protein yang harganya relatif mahal saja yang konsumsinya terbatas, tetapi juga pangan sumber karbohidrat yang harganya relatif murah.

Selama periode 1996-2005 tingkat konsumsi beras mengalami penurunan, baik pada rumah tangga rawan pangan maupun agregat. Penurunan konsumsi beras yang terjadi pada tahun 1999 dapat dikatakan merupakan dampak dari terjadinya krisis ekonomi karena sejumlah studi mikro memperlihatkan bahwa rumah tangga telah mengurangi konsumsi beras dan mengonsumsi beras berkualitas rendah sebagai akibat dari krisis ekonomi (Sawit, 1999). Bagi rumah tangga rawan pangan, selama krisis ekonomi, mengonsumsi jagung dan ubi kayu juga menjadi alternatif pengganti beras. Penurunan konsumsi beras yang terus terjadi hingga tahun 2005 menunjukkan kecenderungan adanya diversifikasi konsumsi pangan pada rumah tangga rawan pangan maupun rumah tangga secara agregat.

Karena tingkat konsumsi pangan pokok lainnya seperti jagung, ubikayu, ubijalar, dan sagu juga mengalami penurunan selama periode tersebut, maka tidak

dapat dikatakan bahwa konsumsi beras menurun karena disubstitusi oleh pangan pokok lokal lainnya. Salah satu alasan yang mungkin menyebabkan turunnya konsumsi beras adalah substitusi beras oleh gandum (mi dan roti) karena temuan Ariani (2004) menunjukkan bahwa gandum (mi dan roti) sudah menjadi pangan pokok kedua setelah beras dan menggeser posisi pangan pokok lokal seperti ubikayu dan jagung. Di samping itu, patut dicatat bahwa data konsumsi beras yang dianalisis dari data Susenas hanyalah yang dimasak di rumah, bukan yang dibeli dalam bentuk makanan jadi, padahal kecenderungan yang terjadi akhir-akhir ini adalah meningkatnya konsumsi makanan jadi, khususnya di daerah perkotaan.

Tabel 6. Tingkat Konsumsi Pangan Rumah Tangga Rawan Pangan dan Agregat Menurut Komoditas di Indonesia, 1996-2005

| Komoditas | (Kg/Kap/Thn) | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|---------|--------|--------|-------|
| | Rawan Pangan | | | | Agregat | | | |
| | 1996 | 1999 | 2002 | 2005 | 1996 | 1999 | 2002 | 2005 |
| <i>Pangan Sbr Karbohidrat:</i> | | | | | | | | |
| Beras | 87,16 | 78,18 | 72,71 | 66,59 | 147,90 | 103,60 | 100,40 | 99,55 |
| Jagung | 3,00 | 4,06 | 3,66 | 3,24 | 3,68 | 3,14 | 3,60 | 3,43 |
| Ubikayu | 10,44 | 10,74 | 8,93 | 7,78 | 14,84 | 12,47 | 12,03 | 11,60 |
| Ubijalar | 2,85 | 1,70 | 1,41 | 4,45 | 4,12 | 2,72 | 2,64 | 3,93 |
| Sagu | 0,55 | 0,66 | 0,23 | 0,40 | 1,02 | 0,51 | 0,39 | 0,76 |
| <i>Pangan Sumber Protein:</i> | | | | | | | | |
| Kedelai | 3,94 | 3,71 | 4,33 | 3,81 | 5,98 | 5,42 | 6,77 | 6,80 |
| Daging unggas | 1,38 | 0,55 | 1,10 | 1,29 | 4,75 | 1,76 | 3,52 | 4,09 |
| Daging ruminansia | 0,51 | 0,29 | 0,39 | 0,43 | 1,54 | 0,78 | 1,00 | 1,10 |
| Telur | 3,44 | 2,14 | 3,20 | 3,54 | 7,29 | 3,83 | 5,91 | 6,41 |
| Susu | 0,24 | 0,26 | 0,37 | 0,55 | 1,53 | 0,86 | 1,40 | 1,73 |
| Ikan segar | 10,68 | 8,32 | 10,65 | 11,27 | 21,21 | 12,86 | 15,59 | 17,49 |
| Ikan awetan | 1,78 | 1,39 | 1,64 | 1,78 | 3,08 | 1,98 | 2,22 | 2,67 |

Sumber: BPS, Susenas 1996, 1999, 2002, dan 2005 (diolah)

Diantara berbagai bahan pangan sumber protein nampak bahwa ikan segar merupakan bahan pangan yang terpenting, meskipun pada rumah tangga rawan pangan tingkat konsumsinya jauh lebih rendah dibandingkan agregat. Secara umum tingkat konsumsi pangan sumber protein menurun pada tahun 1999 sebagai akibat krisis ekonomi, namun kemudian meningkat kembali pada masa-masa setelahnya.

Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan konsumsi energi dan protein dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kondisi gizi masyarakat. Tabel 7 menunjukkan bahwa walaupun secara agregat tingkat konsumsi energi sudah melebihi angka yang

direkomendasikan, namun tingkat konsumsi rumah tangga rawan pangan pada tahun 2005 baru mencapai 67 persen. Kendati angka tersebut menunjukkan perbaikan dibanding tahun 1999, namun masih lebih rendah dari tahun 1996. Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak krisis ekonomi belum sepenuhnya teratasi. Kondisi serupa terjadi pada konsumsi protein (Tabel 8), di mana secara agregat tingkat kecukupan konsumsi protein mencapai 117 persen, namun pada rumah tangga rawan pangan hanya sebesar 71,19 persen.

Tabel 7. Tingkat Konsumsi Energi Rumah Tangga Rawan Pangan dan Agregat di Indonesia, 1996-2005

| Uraian | Rawan Pangan | | | | Agregat | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1996 | 1999 | 2002 | 2005 | 1996 | 1999 | 2002 | 2005 |
| <u>Indonesia</u> | 1533 (76,65) | 1393 (69,67) | 1409 (70,45) | 1340 (67,00) | 2761 (138,00) | 1951 (97,55) | 2089 (104,50) | 2150 (107,50) |
| <u>Daerah</u> | | | | | | | | |
| Kota | 1550 (77,49) | 1406 (70,31) | 1412 (70,62) | 1364 (68,20) | 2673 (133,70) | 1914 (95,68) | 2052 (102,60) | 2083 (104,15) |
| Desa | 1524 (76,19) | 1386 (69,30) | 1407 (70,37) | 1331 (66,55) | 2819 (140,90) | 1978 (98,88) | 2119 (106,00) | 2197 (109,85) |
| <u>Pulau</u> | | | | | | | | |
| Jawa | 1531 (76,57) | 1402 (70,12) | 1417 (70,83) | 1370 (68,50) | 2561 (128,00) | 1872 (93,60) | 2024 (101,20) | 2050 (102,50) |
| Luar Jawa | 1535 (76,73) | 1385 (69,26) | 1403 (70,13) | 1319 (65,95) | 2924 (146,20) | 2023 (101,20) | 2155 (107,80) | 2244 (112,20) |

Sumber: BPS, Susenas 1996, 1999, dan 2002 (diolah)

Keterangan: Angka dalam tanda () menunjukkan persentase terhadap angka kecukupan energi nasional sebesar 2000 kkal/kap/hari sesuai yang ditetapkan pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII tahun 2004.

Walaupun cenderung lebih tinggi di daerah perkotaan, tingkat konsumsi energi dan protein pada rumah tangga rawan pangan di perkotaan dan perdesaan tidak menunjukkan perbedaan yang tajam. Demikian pula halnya dengan tingkat konsumsi energi dan protein rumah tangga rawan pangan di di Jawa dan di luar Jawa. Namun demikian, secara agregat nampak bahwa tingkat konsumsi energi dan protein di luar Jawa lebih tinggi dibandingkan di Jawa.

Ariani *et al.* (2007) menunjukkan bahwa beras merupakan sumber energi dan protein utama bagi rumah tangga rawan pangan maupun agregat, namun terlihat bahwa proporsi energi maupun protein asal beras pada rumah tangga rawan pangan lebih tinggi dibandingkan agregat nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa beras menempati posisi sangat penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi maupun protein bagi penduduk Indonesia, terlebih bagi rumah tangga rawan pangan. Sementara itu, kontribusi pangan pokok lainnya seperti jagung, ubikayu, ubijalar dan sagu sangat kecil.

Tabel 8. Tingkat Konsumsi Protein Rumah Tangga Rawan Pangan dan Agregat di Indonesia, 1996-2005

| Uraian | Rawan Pangan | | | | Agregat | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1996 | 1999 | 2002 | 2005 | 1996 | 1999 | 2002 | 2005 |
| Indonesia | 40,66 (78,19) | 36,30 (69,80) | 38,29 (73,64) | 37,02 (71,19) | 74,80 (143,80) | 51,86 (99,74) | 57,59 (110,80) | 60,84 (117,00) |
| <u>Daerah</u> | | | | | | | | |
| Kota | 42,57 (81,86) | 38,18 (73,43) | 40,37 (77,64) | 39,97 (76,87) | 75,59 (145,40) | 52,95 (101,80) | 59,31 (114,10) | 62,70 (120,58) |
| Desa | 39,61 (76,18) | 35,23 (67,75) | 37,26 (71,66) | 35,83 (68,90) | 74,27 (142,80) | 51,09 (98,25) | 56,18 (108,00) | 59,55 (114,52) |
| <u>Pulau</u> | | | | | | | | |
| Jawa | 40,49 (77,86) | 36,81 (70,78) | 39,20 (75,38) | 38,43 (73,90) | 69,68 (134,00) | 50,01 (96,17) | 56,70 (109,00) | 58,90 (113,27) |
| Luar Jawa | 40,84 (78,54) | 35,83 (68,91) | 37,53 (72,17) | 35,98 (69,19) | 78,97 (151,90) | 53,55 (103,00) | 58,51 (112,50) | 62,67 (120,52) |

Sumber: BPS, Susenas 1996, 1999, dan 2002 (diolah)

Keterangan: Angka dalam tanda () menunjukkan persentase terhadap angka kecukupan protein nasional sebesar 52 gram/kap/hari sesuai yang ditetapkan pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII tahun 2004.

STRATEGI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

Sejalan dengan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 dan PP No. 25 tahun 2000, maka pelaksanaan manajemen pembangunan ketahanan pangan di pusat dan daerah diletakkan sesuai dengan peta kewenangan pemerintah. Dalam PP No. 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan dalam Bab VI Pasal 13 ayat 1 tertulis dengan jelas bahwa “Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Untuk menguatkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, terdapat kesepakatan bersama Gubernur/ketua DKP Provinsi yang mengharuskan mereka untuk mengembangkan berbagai program dan kegiatan ketahanan pangan yang komprehensif serta berkesinambungan dalam rangka memantapkan ketahanan pangan nasional”. Program dan kegiatan tersebut menjadi prioritas program pembangunan daerah.

Berkaitan dengan penurunan proporsi rumah tangga rawan pangan dan penurunan prevalensi gizi buruk yang sekaligus sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan dan kualitas sumberdaya manusia, peranan pemerintah daerah adalah penting. Mengingat proporsi rumah tangga rawan pangan dan gizi buruk

serta potensi di setiap daerah adalah berbeda maka dalam era desentralisasi ini upaya penanggulangan kerawanan pangan harus dimulai dari daerah, yang berarti terwujudnya ketahanan pangan nasional harus dimulai dengan penguatan ketahanan pangan daerah (Ariani, 2005). Namun demikian, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah (pusat maupun daerah), namun juga merupakan tanggung jawab bersama dengan masyarakat. Oleh karena itu, peran dan partisipasi masyarakat dalam perwujudan ketahanan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan sangat diharapkan. Dalam hal ini, pemerintah lebih bersifat fasilitator sedangkan masyarakat dapat berperan sesuai dengan kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kelompok/individu. Pemberdayaan posyandu, dasawisma, kepedulian sosial, kegiatan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan aktifitas sosial keagamaan merupakan sarana bagi masyarakat untuk dapat berperan dalam upaya penanggulangan rawan pangan.

PENUTUP

Mengingat relatif tingginya proporsi rumah tangga rawan pangan di provinsi-provinsi luar Jawa khususnya wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan daerah perdesaan, maka penanganan masalah rawan pangan perlu diprioritaskan pada wilayah-wilayah tersebut. Pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pemantapan ketahanan pangan perlu lebih memprioritaskan wilayah KTI dan daerah perdesaan umumnya agar kesenjangan antara Kawasan Timur dan Barat Indonesia serta kesenjangan desa - kota tidak semakin melebar.

Pemantapan ketahanan pangan di wilayah KTI dapat dilakukan antara lain melalui upaya-upaya berikut: (1) peningkatan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga dengan mengembangkan komoditas pangan lokal sesuai potensi sumberdaya dan pola konsumsi setempat; (2) peningkatan produktivitas pertanian melalui akselerasi pemanfaatan teknologi sesuai dengan kapasitas sumberdaya manusia setempat; (3) pembinaan dan pendampingan secara intensif dan berkelanjutan pada program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di wilayah KTI; dan (4) menguatkan jejaring kerja dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ketahanan pangan rumah tangga.

Selain itu, karena di wilayah KTI umumnya distribusi pangan terkendala oleh sarana transportasi dan keterisolasian wilayah, maka upaya peningkatan ketahanan pangan di wilayah KTI memerlukan pengembangan sarana dan prasarana jalan dan transportasi (darat, laut, dan udara) untuk memperlancar distribusi dan membuka keterisolasian wilayah.

Sesuai amanat Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan menyebutkan

bahwa perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Yang dimaksud dengan pemerintah, terdiri dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Masing-masing tingkatan pemerintahan melaksanakan kebijakan dan program ketahanan pangan dan penanganan masalah kerawanan pangan sesuai dengan mandat dan tupoksinya. Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat berperan sesuai dengan kapasitas dan potensi yang dimiliki yang dapat diapresiasi pada kegiatan pemberdayaan posyandu, dasawisma, kepedulian sosial, kegiatan PKK dan aktifitas sosial keagamaan merupakan sarana bagi masyarakat untuk dapat berperan dalam upaya penanggulangan rawan pangan.

Dalam jangka panjang, upaya pemantapan ketahanan pangan dan penanganan rawan pangan di tingkat rumah tangga dapat dilakukan melalui: (a) Menjaga stabilitas harga pangan; (b) Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan; (c) Pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan; (d) Peningkatan efektivitas program raskin; dan (e) Penguatan lembaga pengelola pangan di perdesaan.

Selain itu, perlu adanya program akselerasi pemantapan ketahanan pangan berbasis pemberdayaan masyarakat perdesaan agar dapat diwujudkan ketahanan pangan berkelanjutan untuk seluruh masyarakat. Diseminasi hasil program *PIDRA (Participatory Integrated Development in Rainfed Area)* dan *SPFS (Special Program for Food Security)* perlu digalakkan serta dapat direplikasi di wilayah lain. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mengalokasikan dana APBD untuk mewujudkan ketahanan pangan seluruh masyarakat di wilayahnya secara berkelanjutan. Secara simultan, diperlukan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui penggalakan kembali program keluarga berencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, M. 2004. Analisis Perkembangan Konsumsi Pangan dan Gizi. ICASERD Working Paper No. 67.
- Ariani, M. 2005. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Monograph Series. No. 26. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Litbang Pertanian.
- Ariani, M., E. Ariningsih, I K. Kariyasa, dan M. Maulana. 2007. Kinerja dan Prospek Pemberdayaan Rumah Tangga Rawan Pangan dalam Era Desentralisasi. Kerjasama Penelitian Biro Perencanaan, Departemen Pertanian, dan UNESCAP-CAPSA, Bogor. Departemen Pertanian. 2004. Kinerja Sektor Pertanian Tahun 2000-2003. Jakarta.
- AusAID. 2004. Food Security Strategy. http://www.ausaid.gov.au/publications/pdf/food_security_strategy04pdg. 27 Desember 2005.

- Departemen Pertanian. 2004. Kinerja Sektor Pertanian Tahun 2000-2003. Jakarta.
- Dewan Ketahanan Pangan. 2006. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009. Jakarta.
- Hardinsyah, Hartoyo, D. Briawan, C.M. Dwiriani, dan B. Setiawan. 1999. Membangun Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi yang Tangguh *dalam* R. Thaha et al. (eds). Pembangunan Gizi dan Pangan dari Perspektif Kemandirian Lokal. PERGIZI PANGAN Indonesia dan Center for Regional Resource Development & Community Empowerment. Bogor.
- Khomsan, A. D. Sukandar, U. Sumarwan, dan D. Briawan. 1997. Pangan sebagai Indikator Kemiskinan. *Media Pangan dan Gizi Keluarga*. XXI (1): 34-39.
- Latief, D., Atmarita, Minarto, A. Basuni, dan R. Tilden. 2000. Konsumsi Pangan Tingkat Rumah tangga Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi. *Dalam* A.K. Seta *et al.* (eds.). Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII. Jakarta, 29 Februari – 2 Maret 2000. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- Martianto, D. dan M. Ariani. 2004. Analisis Perubahan Konsumsi dan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Dalam Dekade Terakhir. *Dalam* Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII "Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi". Jakarta, 17-19 Mei 2004.
- Maxwell, D., C. Levin, M. Armar Klemesu, M. Ruel, S. Morris, and C. Ahiadeke. 2000. Urban Livelihoods and Food and Nutrition Security in Greater Accra, Ghana. *In* Research Report-International Food Policy Research Institute (USA), No.112/ International Food Policy Research Institute, Washington, DC (USA); Ghana Univ., Legon (Ghana), Noguchi Memorial Institute for Medical Research; WHO, Geneva (Switzerland), 2000, 172.
- Pakpahan, A., H. P. Saliem, S. H. Suhartini, dan N. Syafa'at. 1993. Penelitian tentang Ketahanan Masyarakat Berpendapatan Rendah. Monograph Series No. 14. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Rachman, H.P.S. 2001. Kajian Pola Konsumsi dan Permintaan Pangan di Kawasan Timur Indonesia. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Saliem, H. P., E. M. Lokollo, T. B. Purwantini, M. Ariani, dan Y. Marisa. 2001. Analisis Ketahanan Pangan Tingkat Rumah tangga dan Regional. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Saliem, H. P., M. Ariani, Y. Marisa, T. B. Purwantini. 2002. Analisis Kerawanan Pangan Wilayah dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Saliem, H.P. dan Supriyati. 2006. Ketahanan Pangan dan Pembangunan Masyarakat dalam kerangka Desentralisasi. Kasus Nusa Tenggara Barat. Laporan Akhir. Kerjasama Penelitian Biro Perencanaan, Departemen Pertanian dan UNESCAP-CAPSA. Jakarta.

- Sawit, H. 1999. Kebijakan Pangan Nasional: Keadaan Sekarang dan Arah ke Depan. *Agro Ekonomika* 2 (XXIX): 27-49.
- Sayogyo. 2002. Pertanian dan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Artikel Tahun I No. 2 Jakarta.
- Simatupang, P., N. Syafa'at, K.M. Noekman, A. Syam, S.K. Dermoredjo dan B. Santoso. 2001. Kelayakan Pertanian Sebagai Sektor Andalan Pembangunan Ekonomi Nasional. Makalah disampaikan pada Forum Diskusi Pembangunan Pertanian di Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor, 10 Mei 2001.
- Suryana, A. 2001. Tantangan dan Kebijakan Ketahanan Pangan. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat untuk Mencapai Ketahanan Pangan dan Pemulihan Ekonomi. Departemen Pertanian, Jakarta, 29 Maret.
- UNDP China. 2001. Food Security and Sustainable Agriculture. <http://www.oecd.org/Sgt/an>. 28 Desember 2005.